

Monitoring Kontrak & Utang Usaha pada Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor DPRD Sulawesi Barat Pasca Gempa Bumi

Mamuju - Majene

Oleh : Angga Oktarian (23-825)

ABSTRAK

Laporan Keuangan merupakan sebuah laporan yang memberikan informasi penting bagi pemangku kepentingan. Maka, informasi yang tercantum dalam sebuah laporan keuangan diwajibkan untuk disajikan secara akurat dan sebenar-benarnya. *Enterprise Resource Planning (ERP)* merupakan suatu aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan semua informasi keadaan proyek termasuk informasi kontrak, biaya dan pembayarannya. Namun dalam praktiknya sulit untuk manajemen dan pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi utang secara luas dan terperinci dengan praktis. Monitoring Kontrak & Utang menyajikan informasi keuangan secara lebih terperinci untuk sebuah proyek konstruksi, monitoring ini menyajikan informasi Kontrak, Progress Biaya, Penagihan atas kontrak dan pembayarannya yang diharapkan dapat menjadi salah satu alat bantu untuk memvalidasi kebenaran dan menghindari kesalahan informasi. Selain itu monitoring kontrak & utang membantu tim keuangan proyek dalam memvalidasi saldo utang *outstanding* dalam neraca laporan keuangan

Kata kunci:Laporan Keuangan, Kontrak , Biaya, Monitoring Kontrak dan Utang

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Laporan Keuangan menjadi elemen yang penting bagi sebuah perusahaan dalam menyajikan informasi yang berguna bagi manajemen sebuah perusahaan. Berbeda dengan Laporan keuangan perusahaan pada umumnya, sebuah proyek konstruksi menyajikan laporan keuangan yang lebih detail pada setiap proyek konstruksi. Dalam sebuah proyek konstruksi menyajikan laporan keuangan berupa laporan neraca proyek, laporan laba rugi, laporan piutang, laporan saldo kas, dan lain-lain. Maka menjadi sebuah keharusan bagi sebuah proyek konstruksi untuk dapat menyajikan laporan keuangan proyek dengan benar dan akurat.

Laporan Keuangan Proyek Konstruksi memuat informasi aset lancar, utang jangka pendek, laba rugi dan arus kas yang berupa pembebanan dari induk (Kantor Pusat). Namun, dalam penyajian laporan keuangan, sering kali ditemui beberapa risiko yang menyebabkan adanya potensi salah saji laporan keuangan sehingga risiko tersebut dapat menyebabkan bias terhadap manajemen dalam mengambil keputusan manajerial. Selain itu ada beberapa risiko seperti tidak tercatatnya beberapa transaksi yang terjadi memunculkan potensi laporan keuangan tidak memuat informasi yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini sangat penting untuk sebuah proyek konstruksi untuk dapat memastikan bahwa semua pencatatan semua transaksi telah dibukukan dengan tepat.

Meskipun Perusahaan telah menyediakan sebuah aplikasi penunjang pekerjaan yaitu *Enterprise Resource Planning (ERP)*, menurut penulis penggunaan aplikasi tersebut belum mencapai potensi maksimalnya karena merupakan sebuah tools yang cukup baru yang digunakan bagi beberapa pengguna, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang cukup rumit untuk digunakan. Maka perlu pelatihan berkala sehingga semua pengguna aplikasi tersebut dapat menggunakan dengan maksimal. Karena aplikasi tersebut tidak cukup praktis digunakan oleh beberapa pihak maka sedikit sulit melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap informasi sebuah proyek konstruksi. Karena beberapa informasi yang dimuat dapat diakses pada menu yang berbeda, maka dalam mengolah data-data informasi keuangan cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Penggunaan aplikasi ERP juga tidak memiliki sebuah menu yang dapat memvalidasi saldo utang rekanan secara akurat sehingga bagi pihak penyusun laporan keuangan sangat sulit menentukan apakah sebuah progress, saldo utang rekanan, tagihan terbayar dan sisa saldo rekanan tersebut telah valid dan menunjukkan data yang sebenar-benarnya.

Karena keterbatasan tersebut, tim keuangan proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor DPRD Sulawesi Barat Pasca Gempa Bumi – Majene membuat dan mengolah sebuah data menggunakan *Microsoft Excel* yang dapat digunakan pihak manajemen, penyusun laporan keuangan untuk memantau secara menyeluruh seluruh kontrak pekerjaan rekanan, progress pekerjaan rekanan, tagihan terbayar perkontrak rekanan, dan sisa saldo yang utang, retensi dan biaya akan dibayar perkontrak dan rekanan pada laporan keuangan. Sehingga pada akhir proyek dalam menentukan *Final Account* dan sebuah kontrak pekerjaan vendor,

dapat menjadi akurat dan menjadi dasar pengamatan awal dalam administrasi yang akan diperlukan pada akhir proyek.

LATAR BELAKANG

Kejadian Gempa bumi pada tanggal 15 Januari 2021 di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene dengan 6,2 Magnitudo merusak beberapa bangunan baik itu bangunan Pemerintahan maupun rumah milik warga. Dalam situasi Tanggap Darurat berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor: R15/Seskab/DKK/01/2021 tertanggal 21 Januari 2021 tentang Arahan Presiden saat meninjau lokasi terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/28/SULBAR/1/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.

Dengan rusaknya berbagai fasilitas pelayanan terdampak gempa bumi 6,2 Magnitudo di Kabupaten Mamuju dan Majene, berdampak terhambatnya pelayanan masyarakat. Salah satu bangunan yang terdampak gempa bumi yaitu Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi pembangunan berada di Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Rangas Kecamatan Simboro dan Kepulauan Rangas Kabupaten Mamuju.

PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan Perusahaan BUMN yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi menjadi kontraktor pelaksana Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor DPRD Sulawesi Barat Pasca Gempa Bumi Mamuju – Majene yang mulai dikerjakan pada tahun 2023. Adapun kontrak atas proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor DPRD Sulawesi Barat Pasca Gempa Bumi Mamuju – Majene Sebesar Rp. 98,376,000,000 di mulai pada 10 Mei 2023 dengan waktu pekerjaan selama 390 hari kalender atau hingga 02 Juni 2024. Selanjutnya sesuai dengan Addendum IV pada tanggal 05 Maret 2024, nilai kontrak proyek Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor DPRD Sulawesi Barat Pasca Gempa Bumi Mamuju – Majene menjadi Rp. 106,140,071,000 dan sesuai addendum V pada tanggal 14 Mei 2024 waktu pekerjaan menjadi 465 hari kalender atau hingga 16 Agustus 2024.

Beberapa pekerjaan yang tercantum dalam *Bill of Quantity (BOQ)* pada proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pasca Gempa Bumi antara lain adalah :

- Pekerjaan Persiapan

- Pekerjaan SMKK
- Pekerjaan Struktur
- Pekerjaan Arsitek
- Pekerjaan MEP
- Pekerjaan TPS
- Pekerjaan Infrastruktur
- Pekerjaan Landscape (Softcase & Hardscape)
- Pekerjaan GWT & RWT
- Pekerjaan STP
- Pekerjaan Power House

Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, biaya produksi proyek konstruksi akan merujuk pada Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) yang telah direncanakan. Biaya produksi dalam proyek Konstruksi ini merupakan biaya langsung yang dibagi menjadi 4 klasifikasi biaya yaitu biaya upah, biaya material, biaya alat dan biaya subkontraktor. Biaya Langsung ini dicatat dengan metode *Matching Cost* dan dengan metode *Accrual Basis*, dengan mengakui progress pekerjaan yang telah dilakukan atas pekerjaan rekanan berkontrak. Namun, sebelum melakukan pengakuan atas biaya dan pembayaran, biaya langsung pada proyek konstruksi harus melewati beberapa persetujuan antara lain adalah Rencana Umum Pegadaan, Kontrak, Progres Vendor, dan Progress Penagihan yang selanjutnya baru dapat dilakukan pembayaran.

Dalam hal ini, PT Brantas Abipraya menyediakan aplikasi berbasis web yaitu *Enterprise Resource Planning (ERP)* yang saling terintegrasi dari Rencana Umum Pelaksanaan, Kontrak, Progress Vendor, Progress Penagihan hingga pembayaran atas biaya tersebut. Namun, pada pelaksanaannya sering kali ditemui resiko yang memungkinkan penggunaan aplikasi tersebut menjadi kurang optimal seperti membutuhkan persetujuan atas RUP, kontrak dan lain sebagainya meskipun sebuah pekerjaan atas rekanan tersebut telah dilakukan. Sehingga memungkinkan adanya resiko beberapa informasi atau transaksi belum tercatat atau risiko salah saji dalam pencatatan laporan keuangan. Meskipun semua informasi biaya tersebut harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang, manajemen proyek perlu untuk melakukan validasi atas semua biaya yang telah muncul dan telah terbayarkan atas pekerjaan tersebut. Selain itu, tim keuangan sulit untuk memantau dan memonitoring semua progress

pengadaan dan pekerjaan konstruksi secara luas dari kontrak pekerjaan, progress berjalan, tagihan terbayarkan hingga utang yang masih belum dibayarkan oleh pihak proyek.

Dalam akhir pelaksanaan pekerjaan, nilai biaya yang telah dibayarkan akan dicocokkan dengan kontrak bersama rekanan. Jika terdapat selisih maka sebuah kontrak terhadap rekanan akan dilakukan Addendum sehingga secara administrasi dan disaat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak terdapat kendala pada kemudian hari. Perlu untuk pihak manajemen memastikan bahwa biaya yang telah dibayar telah sesuai dengan kontrak dengan rekanan. Namun, pada perjalanan pekerjaan, seringkali ditemui adanya potensi selisih diakibatkan oleh denda, potongan tagihan, potongan diskonto akibat pembayaran tunai yang menyebabkan terjadinya selisih atas kontrak pekerjaan dan biaya yang telah dibayarkan

Untuk mensesederhanakan proses-proses tersebut dan risiko yang akan muncul tim keuangan proyek membuat sebuah monitoring kontrak dan progress pekerjaan vendor dalam aplikasi *Microsoft Excel*. Dalam hal ini, proyek mengembangkan monitoring yang mengumpulkan data sebuah kontrak pekerjaan, progress yang telah diakui, pembayaran serta sisa saldo utang yang tersedia sehingga dapat menjadi validasi atas Laporan Neraca pada laporan keuangan proyek. Selain itu, untuk setiap kontrak pekerjaan tercatat semua progress penagihan secara rinci dan terintegrasi terhadap ERP sehingga dapat memudahkan proyek untuk memperoleh dan mensortir data secara menyeluruh dan lebih cepat.

Monitoring Kontrak dan Biaya ini juga memungkinkan manajemen untuk memantau semua progress biaya, tagihan yang telah diterima serta pembayaran secara lebih luas dan memungkinkan juga untuk melihat sebuah tagihan secara lebih rinci.

TINJAUAN PUSTAKA

1. RENCANA BIAYA PELAKSANAAN

Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) merupakan sebuah dokumen yang berisikan perencanaan biaya dan pendapatan sebuah pekerjaan proyek konstruksi. Didalam dokumen ini berisi semua perencanaan biaya yang akan muncul dan direncanakan peritem biayanya. Rencana Biaya Pelaksanaan akan menjadi pedoman proyek konstruksi dalam menjalankan aktivitas konstruksinya. Menurut Syah, M.S, 2004 Proyek Konstruksi adalah salah satu dokumen kelengkapan yang dibutuhkan dalam suatu operasional pelaksanaan proyek, sebagai acuan operasional pelaksanaan proyek. Kelengkapan dokumen dalam Rencaan Biaya Pelaksanaan (RBP) Proyek Konstruksi, harus memuat antara lain, (Syah, M.S, 2004), yaitu:

1. Pendapatan, yang terdiri dari: RAB yang sudah dikurangi PPN 11 %
2. Biaya Di Pekerjaan (BDP), yang terdiri dari:
 - a. Biaya langsung (direct cost).
 - b. Biaya tidak langsung (indirect cost).
 - c. Keuntungan.

Menurut Prawoto (2013), Rencana Biaya Pelaksanaan adalah dokumen yang memuat perhitungan rinci biaya yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah proyek mulai dari awal hingga selesai, termasuk biaya bahan, upah pekerja, peralatan, dan biaya tak terduga. Menurut Soeharto (2001), Rencana Biaya Pelaksanaan sebagai estimasi biaya yang diorganisir secara sistematis berdasarkan tahapan-tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua biaya yang dibutuhkan sudah diperhitungkan dengan tepat.

2. BIAYA

Biaya yaitu nilai yang telah dikorbankan dalam rangka mendapatkan barang ataupun jasa yang diharapkan akan memberi manfaat saat ini ataupun dimasa datang bagi organisasi (Hansen & Mowen, 2006). Informasi biaya yang akurat sangat diperlukan oleh setiap pemakai informasi biaya. Oleh karena itu tingkat kemampuan individu dalam menelusuri biaya berpengaruh terhadap objektifitas ukuran biaya yang dihasilkan, kemudian informasi biaya tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan (Carter & Ursy, 2002).

3. KLASIFIKASI BIAYA

Klasifikasi biaya yaitu pengelompokkan atas keseluruhan biaya-biaya yang terjadi kedalam golongan tertentu sesuai dengan perilaku biayanya yang bertujuan untuk dapat memberikan informasi yang jelas untuk dipahami (Bustami & Nurlela, 2008). Menurut Lestari & Permana (2017) biaya berdasarkan kemudahan penelusurannya dibagi kedalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung didefinisikan sebagai biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke objek biayanya, contohnya biaya bahan baku langsung (direct material) dan biaya tenaga kerja langsung (direct labor). Biaya tidak langsung (indirect cost) yaitu biaya yang sulit ditelusuri secara langsung pada suatu objek biaya. Sementara menurut Hansen & Mowen (2015) biaya berdasarkan fungsi dibagi menjadi biaya produksi dan biaya non produksi. Kemudian, biaya produksi dapat diklasifikasi lagi menjadi biaya bahan baku

langsung (direct material), biaya tenaga kerja langsung (direct labor), serta biaya overhead. Sementara biaya nonproduksi diklasifikasikan menjadi biaya pemasaran serta biaya admin-istrasi & umum. Selanjutnya biaya juga dapat diklasifikasikan berdasarkan perilakunya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel (Hansen & Mowen, 2015).

4. BIAYA PROYEK

Biaya Proyek terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung memiliki hubungan terhadap waktu dan cenderung bertolak belakang. Jika waktu pelaksanaan proyek dipercepat akan mengakibatkan peningkatan biaya langsung tetapi pada biaya tidak langsung terjadi penurunan (Sudarsana, 2008). Menurut Dipohusodo (1995), keseluruhan biaya konstruksi biasanya meliputi analisis terhadap lima unsur utamanya, yaitu :

1. Biaya material

Biaya material adalah biaya pembelian material, hingga material tersebut tiba di lokasi proyek. Jadi biaya material merupakan kombinasi harga material ditambah dengan ongkos pengangkutan sampai ke lokasi proyek. Agar diperoleh biaya tersebut, maka harus diketahui harga pembelian material dan biaya pemindahannya ke lokasi pekerjaan.

2. Biaya Tenaga Kerja.

Estimasi komponen tenaga kerja merupakan aspek paling sulit dari keseluruhan analisis biaya konstruksi. Faktor berpengaruh yang harus diperhitungkan antara lain: kondisi tempat kerja, keterampilan, lama waktu kerja, kepadatan penduduk, persaingan, produktivitas dan indeks biaya hidup setempat. Satuan tenaga kerja dinyatakan dalam rupiah perjam-orang, rupiah perhari-orang, rupiah perminggu-orang dan lain lain.

3. Biaya Peralatan.

Estimasi biaya peralatan termasuk pembelian atau sewa, mobilisasi, demobilisasi, memindahkan, transportasi, memasang, membongkar dan pengoperasian selama konstruksi berlangsung.

4. Biaya Tidak Langsung (indirect cost)

Biaya overhead adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan namun tidak berhubungan langsung dengan biaya bahan, peralatan, dan tenaga kerja. Biaya overhead umumnya terbagi 2, yaitu biaya overhead umum dan biaya overhead proyek.

5. BIAYA LANGSUNG

Biaya langsung adalah biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung dengan objek biaya tertentu, seperti produk, departemen, atau proyek. Menurut Mulyadi (2014) mengartikan biaya langsung sebagai biaya yang terjadi dalam hubungan dengan pembuatan suatu produk tertentu atau penyediaan jasa tertentu, yang dapat diidentifikasi secara langsung ke objek biaya tersebut tanpa alokasi.

6. RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

Menurut Prosedur *Supply Chain Management* No 2-000-52-02/19 Tentang *Supply Chain Management* Rencana Umum Pengadaan adalah dasar pengadaan diatas 100 Juta (bisa digunakan untuk PBJ <100 Juta Untuk kebutuhan PBJ yang perlu tender/seleksi) yang dibuat berdasarkan anggaran biaya dan *master schedule* (kecuali proyek darurat atau proyek yang sifatnya belum memiliki rencana namun harus segera dilaksanakan) dalam bentuk pemaketan dan dapat dilaksanakan melalui pemilihan (tender/seleksi) pada *e-proc* atau *e-katalog*

7. PAGU

Pagu adalah batas maksimal anggaran yang disediakan atau diizinkan untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek tertentu. Pagu anggaran ini ditetapkan untuk memastikan pengeluaran tidak melebihi dana yang telah dianggarkan, serta untuk menjaga disiplin fiskal dan efisiensi penggunaan dana. Menurut Mardiasmo (2009), pagu anggaran adalah batas maksimal dana yang dialokasikan untuk masing-masing unit kerja atau program dalam satu periode anggaran, yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran belanja.

8. RENCANA KEBUTUHAN BARANG/JASA (RKBJ)

Menurut Prosedur *Supply Chain Management* No 2-000-52-02/19 Tentang *Supply Chain Management* Rencana Kebutuhan Barang/Jasa adalah dasar pengadaan sampai dengan 100 juta yang dibuat berdasarkan anggaran biaya dan *master schedule* untuk pengadaan langsung yang dapat dilaksanakan melalui *marketplace*.

9. RENCANA KEBUTUHAN PERKECUALIAN BARANG/JASA (RKPBJ)

Menurut Prosedur *Supply Chain Management* No 2-000-52-02/19 Tentang *Supply Chain Management* Rencana Kebutuhan Perkecualian Barang/Jasa digunakan untuk pengadaan dikecualikan dalam prosedur dan dapat dilaksanakan melalui e-katalog

10. KONTRAK (ON AGREEMENT)

Menurut Prosedur Supply Chain Management No 2-000-52-02/19 Tentang *Supply Chain Management* Kontrak adalah perjanjian dengan rekanan sebagai penyedia barang / jasa dengan menetapkan harga satuan, syarat dan kondisi yang dapat direview secara periode tertentu termasuk kontrak payung

11. SUPPLY CHAIN FINANCING

Supply Chain Financing (SCF) adalah sebuah mekanisme pembiayaan yang dirancang untuk mengoptimalkan modal kerja dan likuiditas di seluruh rantai pasokan. SCF melibatkan berbagai metode dan instrumen keuangan yang memungkinkan pemasok dan pembeli mempercepat arus kas, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional.

12. UTANG USAHA

Menurut Horne dan Wachowicz (2005), Mereka mendefinisikan utang sebagai kewajiban finansial yang timbul akibat transaksi atau perjanjian yang mengharuskan debitur untuk membayar sejumlah uang atau menyediakan jasa kepada kreditor di masa mendatang. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011), utang adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa di masa depan sebagai hasil dari transaksi masa lalu atau peristiwa yang telah terjadi. Menurut Mulyadi (2014), Mulyadi mengartikan utang sebagai kewajiban perusahaan yang timbul karena adanya pembelian barang atau jasa secara kredit, atau pinjaman yang diterima oleh perusahaan yang harus dilunasi pada masa yang akan datang.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek, pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi kasus terhadap kejadian, aktivitas atau program yang di jalankan. Sampel penelitian ini adalah Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor DPRD Sulawesi Barat Pasca Gempa Bumi Mamuju – Majene

PEMBAHASAN

Sebuah biaya harus melewati beberapa tahapan sebelum dapat terbayarkan. Sebuah biaya konstruksi harus merujuk kepada Rencana Biaya Pelaksanaan Proyek dan kontrak yang telah disepakati bersama. Pada sistem web ERP, Sebuah pekerjaan atau pengadaan konstruksi terikat dengan Kontrak yang disepakati dan menjadi dasar dalam pembiayaan dan pembayaran. Namun sebelum kontrak dibuat dan disepakati sebuah Rencana Umum

Pengadaan atau Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa harus memperoleh persetujuan. Sebagai contoh pada proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor DPRD Sulawesi Barat Pasca Gempa Bumi Mamuju – Majene, Sebuah Pekerjaan Persiapan Lahan memperoleh persetujuan Rencana Umum Pengadaan dengan Pagu sebesar Rp. 327,868,500.00. Pekerjaan Persiapan Lahan tersebut berkontrak dengan rekanan Indirwan Nuralim dengan nomor kontrak SWA-P/SPK-006-V-2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 327,868,000. RUP ini dapat dilihat di *SCM – Procurement* pada ERP dan pada menu Perencanaan Pengadaan.

RUP/2023/01090

Proyek	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pasca Gempa Mamuju Majene (Tender Ulang)	Detail Pekerjaan	Struktur
Bisnis Unit	Divisi Operasi 1/ Proyek 1	Kategori Pengadaan	SUBKON
Nama Paket	Pekerjaan Persiapan Lahan	Role Usaha	Jasa Konstruksi
No.RUP	SWA/ERP/00038/PMRT/-P/645/RUP	Jenis Pengadaan	Perkiraan Sendiri
Konsolidasi ?	<input type="checkbox"/>	Jenis TKDN	Rp 0.00
Libatkan SCM?	<input type="checkbox"/>	Komponen Luar Negeri	komponen ini adalah nilai total rupiah dari biaya barang dan jasa berasal dari LN yang ada dalam paket
Metode Tender	Tender Cepat	Keterangan	0.00%
Cara Pengadaan	Umum	Nilai TKDN	<input checked="" type="checkbox"/>
Krajic Matrix	Leverage	Tidak ada Komponen Luar Negeri?	
Keterangan	Leverage: Item Major,Tidak Kritis,Banyak Rekanan,Mudah didapatkan,Produk Standar Strategi: Item Major,Kritis,1-2 Rekanan,Sulit didapatkan,Produk Spesial Non Critical: Item Minor,Tidak Kritis,Banyak Rekanan,Mudah didapatkan,Produk Standar Bottleneck: Item Minor,Kritis,1-2 Rekanan,Sulit didapatkan,Produk Spesial	Rencana Pemilihan	06/05/2023 s/d 08/05/2023
		Pelaksanaan Kontrak	09/05/2023 s/d 22/06/2023
		Warehouse In	Gudang Rekanan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pasca Gempa Mamuju Majene: Receipts
		Dibuat Oleh	Yongki Aldino Setiawan
		Di Approve Oleh	Danang Wicaksana

RUP Details
Lokasi Pekerjaan

Sumber Dan...	PAGU	Sisa PAGU	Uraian	Spek...	Ukuran...	E.Comp...	Kategori Pro...	Satuan	Volume	HarSat (Pag...	Total (Pagu)...	HarSat (Hps...	Tote
I/PEKERJAA...	3,749,956,29...	3,659,956,29...	Bobokan Bet...			<input type="checkbox"/>	SERVICE / S...	m2	600.00	150,000.00	90,000,000.00	150,000.00	90,000.00
I/PEKERJAA...	3,749,956,29...	3,728,356,29...	Buangan Pui...			<input type="checkbox"/>	SERVICE / S...	m3	180.00	120,000.00	21,600,000.00	120,000.00	21,600.00
I/PEKERJAA...	3,749,956,29...	3,683,090,79...	Perataan Tan...			<input type="checkbox"/>	SERVICE / S...	m2	7,020.00	9,525.00	66,865,500.00	9,525.00	66,865.00
I/PEKERJAA...	3,749,956,29...	3,639,706,29...	Pembuatan ...			<input type="checkbox"/>	SERVICE / S...	m	315.00	350,000.00	110,250,000.00	350,000.00	110,250.00
I/PEKERJAA...	3,749,956,29...	3,710,803,29...	Pembuatan ...			<input type="checkbox"/>	SERVICE / S...	m2	600.00	65,255.00	39,153,000.00	65,255.00	39,153.00

Subtotal PAGU: Rp 327,868,500.00

Subtotal HPS: Rp 327,868,500.00

1.1. RUP Pekerjaan Persiapan Lahan

Setelah RUP ini disetujui, maka kontrak terhadap Vendor dapat segera dibuat yang menjadi dasar acuan bagi proyek konstruksi dalam membiayai progress pekerjaannya dengan menggunakan konsep *Matching Cost & Accrual Basis*. Proyek Konstruksi wajib menggunakan prinsip ini dan memonitoring untuk setiap tagihannya sesuai dengan progress pekerjaan yang telah diakui oleh tim operasi.

Setelah kontrak tersebut di sepakati, sebuah pekerjaan resmi dikerjakan oleh rekanan terkait dengan berdasarkan kontrak tersebut. Pada bulan Mei 2023, berdasarkan laporan biaya dengan menggunakan prinsip *Accrual Basis* pada pekerjaan dilakukan oleh rekanan

tersebut dengan progress sebesar Rp. 327,868,500.00. Sehingga pada bulan itu memunculkan Saldo Biaya Akan Dibayar – Subkontraktor sebesar Nilai Progressnya. Progress Vendor rekanan ini dapat dilihat di *SCM – Delivery* lalu keprogress Vendor pada aplikasi ERP dengan mencari nomor PO sesuai dengan Kontrak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

No	ITEM PEKERJAAN	Sat	Volume	Harga (Rp.)		Keterangan
				Satuan	Total	
1	Bobokan Beton	m2	600,00	150.000	90.000.000	
2	Buangan Puing	m3	180,00	120.000	21.600.000	
3	Perataan Tanah	m2	7.020,00	9.525	66.865.500	
4	Pembuatan Saluran Buangan dan Penebangan Semak/ Pohon	m	315,00	350.000	110.250.000	
5	Pembuatan Jalan Akses	m2	600,00	65.255	39.153.000	
TOTAL					327.868.500	
GRAND TOTAL					327.868.500	
DIBULATKAN					327.868.500	

Terbilang : (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

1.2. Kontrak Pekerjaan Persiapan Lahan

INDIRWAN NURALIM
Jl Martadinata Perum Zarindah 4 Blok L/44
Mamuju (Kab.) 91512
Indonesia
NPWP: 548773217814000

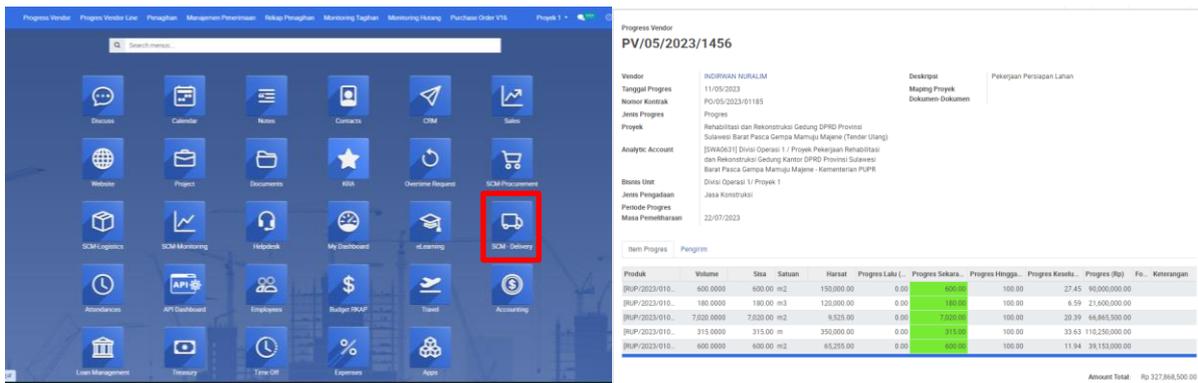
Purchase Order #PO/05/2023/01185

Purchase Representative: Administrator Order Date: 15/05/2023 16:25:13

Description	Taxes	Date Req.	Qty	Unit Price	Amount
Bobokan Beton	PPH PASAL 4 AYAT 2 (PELAKSANA NON KUALIFIKASI)	15/05/2023 16:25:12	600.0000 m2	150.000,00	Rp 90.000.000,00
Buangan Puing	PPH PASAL 4 AYAT 2 (PELAKSANA NON KUALIFIKASI)	15/05/2023 16:25:13	180.0000 m3	120.000,00	Rp 21.600.000,00
Perataan Tanah	PPH PASAL 4 AYAT 2 (PELAKSANA NON KUALIFIKASI)	15/05/2023 16:25:13	7.020.0000 m2	9.525,00	Rp 66.865.500,00
Pembuatan Saluran Buangan dan Penebangan Semak/ Pohon	PPH PASAL 4 AYAT 2 (PELAKSANA NON KUALIFIKASI)	15/05/2023 16:25:13	315.0000 m	350.000,00	Rp 110.250.000,00
Pembuatan Jalan Akses	PPH PASAL 4 AYAT 2 (PELAKSANA NON KUALIFIKASI)	15/05/2023 16:25:13	600.0000 m2	65.255,00	Rp 39.153.000,00
Subtotal					Rp 327.868.500,00
Taxes					Rp -13.114.740,00
Total					Rp 314.753.760,00

VIA E-PROC

1.3. Kontrak pada sistem ERP Pekerjaan Persiapan Lahan



1.4. Progress Vendor Kontrak PO/05/2023/01185

Setelah melakukan pekerjaan dan melakukan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada pihak terkait, rekanan baru dapat melakukan penagihan atas kontrak sesuai dengan kesepakatan antara proyek dan rekanan terkait. Selanjutnya nomor penagihan ini dibuat dan menjadi Vendor Bill pada sistem ERP agar dapat dilakukan pembayaran terhadap rekanan terkait. Adapun data penagihan ini dapat dilihat pada *SCM – Delivery* di menu data penagihan.

Dalam melakukan pembayaran tagihan kepada rekanan, umumnya Proyek Konstruksi Menggunakan Fasilitas *Supply Chain Financing* yang membutuhkan dokumen-dokumen lengkap seperti Voucher pembayaran, kwitansi, Invoice, Faktur Pajak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Faktur Pajak, dan Surat Permohonan pembayaran, serta lampiran kontrak. Setelah diajukan, pembayaran akan segera dilakukan terhadap rekanan terkait yang berkontrak pada pekerjaan proyek Konstruksi.

Sebuah tagihan yang akan dibayarkan kerekanan berupa nilai akseptasi yang setelah dipotong pajak. Selain itu juga, beberapa tagihan memiliki potongan uang muka, potongan retensi, dan potongan lain-lain. Secara sederhana perhitungan sebuah nilai akseptasi adalah sebagai berikut:

$$DPP = \text{Progress Pekerjaan} - \text{Pot. Retensi} - \text{Pot Uang Muka}$$

$$\text{Nilai Akseptasi} = DPP + \text{PPN } 11\% - \text{PPh} - \text{Potongan Lain Lain} - \text{PPN } 11\%(\text{jika WAPU})$$

Nilai akseptasi inilah yang akan diajukan kepada pemberi layanan fasilitas Supply Chain Financing untuk dibayarkan kepada rekanan dengan potongan diskonto sesuai dengan tarif diskonto pemberi fasilitas SCF. Selain itu, PPh wajib disetor dan dilapor oleh pihak proyek konstruksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Nomor
PP/05/2023/1064

Tanggal Penagihan 11/05/2023

Tanggal Jatuh Tempo Vendor INDIRWAN NURALIM

Jenis Tagihan Progres

PIC (Vendor) Indirwan Nuralim

Bank BANK BNI

Dokumen

Invoice Kwitansi 01-KWT-INDIRWAN NURALIM - PEKERJAAN PERSIAPAN LAHAN.pdf

BAST Copy Kontrak 03-KONTRAK-INDIRWAN NURALIM - PEKERJAAN PERSIAPAN LAHAN.pdf

Faktur Pajak PPN BAPP 04-BAPP-INDIRWAN NURALIM - PEKERJAAN PERSIAPAN LAHAN.pdf

BAP & Potongan 02-BAP-INDIRWAN NURALIM - PEKERJAAN PERSIAPAN LAHAN.pdf

BAST 1 BAST 100% Laporan SPT Sebelumnya Laporan SPT Terakhir BA Hasil Uji Dokumen Lain SUB 001 - INDIRWAN NURALIM - PEKERJAAN PERSIAPAN LAHAN.pdf

Faktur Pajak Tanggal Faktur Pajak Nomor BAST/BAPP SWA-P/BAPP-DPDMJ-HDRPP-01-V-2023 Tanggal BAST/BAPP 11/05/2023

Item Ditegih Histori Penagihan Histori Approval Plefon

Status Progres & Plefon All Status Progres & Plefon

Produk	Deskripsi	Progres (qty...	Satuan...	Harga Unit	Total	Potongan U...	Potongan R...	Potongan Le...	Pajak	Jumlah Tota...	Tax	
[RUP/2023/0...	Boboken Bet...	600.000000	m2	150.000.00	90.000.000.00	0.00	0.00	0.00	PPH PASA...	90.000.000.00	-3.600.000.00	86.4
[RUP/2023/0...	Buengen Pui...	180.000000	m3	120.000.00	21.600.000.00	0.00	0.00	0.00	PPH PASA...	21.600.000.00	-864.000.00	20.7
[RUP/2023/0...	Perataan Tan...	7.020.000000	m2	9.525.00	66.865.500.00	0.00	0.00	0.00	PPH PASA...	66.865.500.00	-2.674.620.00	64.1
[RUP/2023/0...	Pembuatan ...	315.000000	m	350.000.00	110.250.000.00	0.00	0.00	0.00	PPH PASA...	110.250.000.00	-4.410.000.00	105.0
[RUP/2023/0...	Pembuatan ...	600.000000	m2	65.255.00	39.153.000.00	0.00	0.00	0.00	PPH PASA...	39.153.000.00	-1.566.120.00	37.5

1.5. Data Penagihan PO/05/2023/01185

Early Payment Request (EPR)

Reference	EP00366455		
Date Received	16 JUN 23		
Buyer	BRANTAS ABIPRAYA (DIVISI 1)		
Reference	BA001		
Supplier	INDIRWAN N(BA001)		
Reference	974907769(BA001)		
Requested Credit	314,753,760		



Financial Information

Payment ID		Maximum Tenor	180
Maturity Date	13 DEC 23	Financing Tenor	180
Payment Date	16 JUN 23	Financing Percentage	100 %
Original Currency	IDR	Interest rate	8.45 %

Reference	Type	Amount	Funded	Cost	Payment
SWA-P/BAPIDRPP-01-V-2023	CPO	314,753,760	314,753,760	13,298,346	301,455,414

From	To	Type	Percentage	Amount
364569289	974907769	Financing	100	301455414
364569289	120360420379001	Interest	100	7113435
364569289	120360410203001	Provision	100	6184911
Total:				314,753,760

1.6. Advice Credit PP/05/2023/1064

Sebuah alur yang cukup panjang dan membutuhkan menggunakan beberapa menu pada aplikasi ERP namun memiliki data historis yang detail sehingga dapat memungkinkan proyek untuk memahami alur secara lebih detail. Namun, seringkali persetujuan RUP, Kontrak, Progress Vendor, penagihan serta pembayaran membutuhkan persetujuan yang berjenjang hingga manajemen divisi operasi. Akibat dari persetujuan berjenjang ini seringkali tidak menggambarkan transaksi yang *Real-Time*, selain itu untuk sebuah proyek konstruksi yang telah berjalan lama, untuk mencari dan mengumpulkan informasi mengenai progress pekerjaan sebuah kontrak dan progress pembayaran tagihan akan rumit karena telah banyak informasi yang terjadi dari awal waktu berjalan sebuah pekerjaan. Sejauh ini penulis belum menemukan cara untuk memperoleh informasi secara luas mengenai kontrak pekerjaan, progress biaya, dan pembayaran sebuah biaya langsung pada proyek konstruksi. Selain itu juga, akan sulit bagi tim keuangan proyek dalam memvalidasi saldo utang yang valid dan tidak

salah dalam pembukuannya serta tagihan yang belum terbayar atau pph yang belum terbayar serta sisa retensi atas beberapa tagihan.

Selain itu kendala jika membutuhkan informasi data secara kompleks dalam waktu singkat. Membuka nomor kontrak satu persatu memakan waktu yang cukup lama jika hanya mengandalkan sistem integrasi dari aplikasi ERP. Maka tim keuangan proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor DPRD Sulawesi Barat Pasca Gempa Bumi Mamuju – Majene menggunakan sebuah desain olah data menggunakan *Microsoft Excel* untuk mengumpulkan data dari kontrak, penagihan, pembayaran hingga sisa saldo utang dan saldo yang akan dibayar yang outstanding di neraca. Seperti contoh alur diatas proyek DPRD mensederhanakan menjadi tabel sebagai berikut

NO.	NO PO	REKANAN	URAIAN	NILAI KONTRAK	TOTAL							SISA KONTRAK	
					Total Progress	Penagihan	Pembayaran	Uang Muka	Reelokasi	PPN Non Wapu	Saldo Utang		Saldo Retensi
INDIRWAN NURALIM													
1	PO/05/2023/01185	INDIRWAN NURALIM	Pekerjaan Pensiapan Lahan	327.848.500,00	327.848.500	327.848.500	327.848.500	-	-	-	-	-	-
2	PO/05/2023/01786	INDIRWAN NURALIM	Pekerjaan Direksi Keet dan Pem	96.288.000,00	96.288.000	96.288.000	96.288.000	-	-	-	-	-	-
3	PO/05/2023/01787	INDIRWAN NURALIM	Pekerjaan Sumur Bor dan Instalasi	65.000.000,00	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	-	-	-	-	-
4	PO/06/2023/02775	INDIRWAN NURALIM	Pekerjaan Jaring Pengaman Pro	274.540.000,00	274.540.000	274.540.000	274.540.000	-	-	-	-	-	-
5	PO/07/2023/03929	INDIRWAN NURALIM	Pekerjaan Direksi Keet, Fasum da	361.419.000,00	361.419.000	361.419.000	361.419.000	-	-	-	-	-	-
6	PO/07/2023/03931	INDIRWAN NURALIM	Pekerjaan Washing Boy, Stokyard	40.000.000,00	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	-
7	PO/07/2023/03930	INDIRWAN NURALIM	Pembuatan Toilet Pekerja	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-

1.7. Contoh Monitoring Kontrak dan biaya Rekanan

Rekap kontrak dan progress biaya tersebut merupakan semua biaya yang terjadi dan tervalidasi oleh dokumen fisik kontrak rekanan dan nilai dari nomor *Purchase Order* (kontrak) pada sistem ERP. Dengan monitoring tersebut, memungkinkan manajemen untuk mengetahui secara menyeluruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah rekanan/vendor dan nilai kontraknya secara menyeluruh yang tervalidasi oleh dokumen kontrak fisik. Selain itu, dari awal proyek hingga 31 Mei 2024, total progress pekerjaan sebuah kontrak pekerjaan rekanan dapat dimonitoring secara luas dan dapat dimonitoring secara rinci perbulan berjalan. Selanjutnya dengan menggabungkan beberapa tagihan atas sebuah kontrak pekerjaan, proyek dapat mengetahui total nilai dari sebuah tagihan atas kontrak pekerjaan tersebut dan juga menjelaskan jumlah pembayaran atas penagihan-penagihan tersebut. Sehingga dengan menggabungkan informasi itu, tim proyek dapat mendapatkan nilai dari saldo utang belum terbayar, retensi dan biaya akan dibayar pada neraca lajur. Sehingga dapat menjadi angka yang menjadi validasi saldo utang pada neraca lajur untuk memastikan apakah ada salah saji dalam pencatatan laporan keuangan proyek konstruksi.

Kode																							
Nama Rekanan	NICHIRWAN NURALIM																						
NO PO ERP	PO/05/2023/01185																						
Cara Pembayaran	SCF																						
No.	Jumlah Kontrak	Nilai	Pekerjaan																				
1	SWA-P/SPK-CI	327.868.500	Pekerjaan Persiapan Lahan																				
Total		327.868.500																					
No	Tanggal	Nilai Kontrak	Progress	%	Sisa Kontrak	NO PP	No. Invoice	Pot Retensi	Pot. UM	DPP	Pot PPh	PPN	NO PP	Potongan PPh Lain-lain	Akseptasi	Cair	Pemb. PPh	Sisa Hutang	Tanggal Cair	Tanggal RK PPh	Jurnal RK Pencairan	Jurnal RK Pemb. PPh	
1	11-May-23	327.868.500	327.868.500	100%	-	PP/05/2023/1064	SWA-P/SAP-DPOM-10RPP-05-V-0023	-	-	327.868.500	13.114.740	-	-	-	-	314.753.760	314.753.760	13.114.740	-	16/06/2023	Jun-23	BNI/2023/4555	PPH/2023/1621
SALDO HUTANG		327.868.500	327.868.500	100%	-	-	-	-	-	327.868.500	13.114.740	-	-	-	314.753.760	314.753.760	13.114.740	-	-	-	-	-	

1.8. Contoh Monitoring utang

Dalam Rekap Monitoring Kontrak Biaya tersebut juga berisi kumpulan semua informasi atas pembayaran biaya yang juga langsung terintegrasi dengan monitoring utang tersebut secara rinci, sehingga dengan monitoring tersebut sangat memudahkan pengguna untuk dapat melakukan rincian dari sebuah tagihan kontrak, jurnal pembayaran, jurnal pph serta sisa saldo utang yang telah ada. Dengan monitoring tersebut dapat mempermudah manajemen dan tim keuangan dalam melakukan pemeriksaan sehingga dalam praktiknya akan meminimalisir keadaan salah saji, selisih negatif progress biaya terhadap tagihan.

Selain itu, monitoring kontrak ini dapat menjadi alat bantu yang tepat untuk menentukan sebuah Final Account sebuah kontrak dan biayanya. Pada praktiknya sebuah kontrak tidak selalu menggambarkan biaya yang terjadi pada akhir pekerjaan proyek. Pada praktiknya, denda, potongan diskonto, dan potongan tagihan merupakan satu hal yang umum terjadi dalam pekerjaan proyek Konstruksi. Sebagai contoh dalam proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kantor DPRD Sulawesi Barat ditemui ada beberapa kontrak yang final Accountnya tidak sama dengan Kontrak. Maka, sebuah proyek konstruksi wajib untuk melakukan addendum kontrak sehingga kontrak akan sama dengan nilai yang telah terbayar kepada rekanan terkait.

NO.	NO PO	NOMOR KONTRAK	REKANAN	URAIAN	NILAI KONTRAK	TOTAL																	
						Total Progress	Penagihan	Pembayaran	Utang Muka	Realokasi	PPN Non Wapu	Saldo Utang	Saldo Retensi	Saldo BAD									
CV PUTRA SAMBUNG DUA																							
1	PO/07/2023/03964	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/1	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Pekerjaan Bongkaran Struktur Ba	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PO/07/2023/03967	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/1	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Pekerjaan Buang Bongkaran Stru	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PO/07/2023/03920	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/2	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Erection TC	42.522.613,50	42.522.613,50	42.522.613,50	42.522.613,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PO/07/2023/03924	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/2	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Uji Riksa Tower Crane	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PO/07/2023/03935	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/2	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Pekerjaan Sbabok Kepala Bore Pil	18.854.025,16	18.854.300,00	18.854.300,00	18.854.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PO/08/2023/05541	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/2	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Pekerjaan Penyempitan Antri Ra	97.373.000,00	97.373.151,44	97.373.000,00	97.373.151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PO/11/2023/08797	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/2	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Pekerjaan Bongkaran Struktur	93.845.166,25	93.845.295,00	93.845.166,25	89.949.717,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.895.448,58	-	-	-	-	128,75
8	PO/11/2023/08231	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/2	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Pengelesan Lab	58.310.000,00	58.310.000,00	58.310.000,00	58.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PO/01/2024/10374	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/2	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Pekerjaan Timbunan	413.037.950,76	413.038.144,10	413.037.884,23	413.038.148,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PO/02/2024/11503	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/2	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Pekerjaan Waterproofing	206.179.405,77	206.179.405,00	206.179.164,56	206.179.400,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PO/03/2024/12423	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/1	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Pekerjaan Arsitektur Dinding dan	1.195.171.411,84	1.195.174.911,00	1.195.170.622,21	1.195.174.914,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PO/02/2024/12365	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/2	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Dimantling TC	42.522.613,50	42.522.613,50	42.522.613,50	42.522.614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PO/03/2024/13299	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/1	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Pekerjaan Ornamen GRC	113.740.000,00	113.740.000,00	113.740.000,00	113.740.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PO/03/2024/15228	SWA/ERP/00038/PMRTI-P/1	CV PUTRA SAMBUNG DUA	Pekerjaan Arsitektur	795.382.911,65	795.383.973,57	795.382.893,66	795.383.973,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.9. Monitoring Kontrak dan Biaya

Sebagai contoh sebuah kontrak pekerjaan dari CV Putra Sambung dua dalam pekerjaan Bongkaran Struktur. Kontrak pekerjaan tersebut adalah Rp. 93,845,166.25 dan telah dibiayakan dan ditagihkan sebesar Rp. 93,845,166.25 hingga bulan Mei 2024. Namun pembayaran atas tagihan tersebut menggunakan pembayaran tunai sehingga dalam

Lestari, Wiwik, dan Dhyka Bagus Permana, 2017, Akuntansi Biaya Dalam Perspektif Manajerial, Depok: Penerbit Rajagrafindo Persada

Mulyadi . 2014 . Akuntansi Biaya. Edisi-5. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada..

PT Brantas Abipraya, Prosedur *Supply Chain Management* No 2-000-52-02/19. Jakarta

Sudarsana, Dewa Ketut. 2008. Pengendalian Biaya Dan Jadwal Terpadu pada Proyek Konstruksi. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana, Denpasar.

Syah, M. S., 2004, Manajemen Proyek, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.